

JURNAL ILMIAH

ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)

Oleh:

AGUNG PAMBUDI

NIM. 0910113004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA
Agung Pambudi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: dionisiuspambudi@yahoo.co.id

Abstrak

Asimilasi merupakan proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan membaurkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik. Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar adalah mengikuti ibadah di luar LAPAS, kegiatan sosial atau kerja bakti di masyarakat, kerja di sawah, kolam ikan dan tempat cucian kendaraan milik LAPAS. Terdapat beberapa kendala di dalamnya, yaitu kesulitan mengurus prosedural asimilasi, kurangnya dana dan tenaga ahli, tidak adanya pihak ketiga yang mau menampung anak pidana yang berasimilasi dan pandangan buruk masyarakat terhadap anak pidana. Sedangkan upaya untuk mengatasinya adalah meringankan prosedural asimilasi, penambahan dana dan tenaga ahli alternatif, menjalin kerjasama dengan pihak luar dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata kunci : asimilasi; anak pidana

Abstract

Assimilation is the process of founding prisoner by confound the prisoner or the criminal child with the community. Assimilation goal is to prepare the prisoner or the criminal child to re-live the good life of society. Implementation of assimilation for the criminal child in Child Penitentiary Class IIA Blitar is to worship outside of prisons, social or community service activities in the community, work in the fields, fish ponds and vehicles washing place of prisons owned. There are several obstacles in it, which is difficulty to taking care the procedures of assimilation, lack of funds and specialist staff, nothing third party that would accommodate the criminal child assimilated and bad stigma from community to the criminal child. While the efforts to overcome is give the easy procedural of assimilation, add the alternative funds and specialist staff, cooperation with external parties and provide legal counseling to the community.

Key word : assimilation, criminal child

I. Pendahuluan

Dua tahun belakang ini kejahatan yang melibatkan anak-anak masih tinggi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali wilayah Jawa Timur. Setidaknya selama 2012, Polrestabes Surabaya sudah menangkap 20 anak yang terlibat dalam aksi kejahatan.¹ Dari catatan yang direkam Polres Banyuwangi, ada beragam tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak. Mulai kasus pencurian hingga pembunuhan. Beberapa kasus curanmor di wilayah Muncar dengan 12 TKP, ketua dan anggota sindikat pelakunya masih anak-anak. Kedua, terungkapnya kasus curanmor 6 TKP di wilayah Polsek Wongsorejo juga melibatkan anak-anak berusia 14 tahun. Selain itu, pencurian toko emas di wilayah hukum Polsek Tegaldimo juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pembunuhan di Srono, hingga kejahatan jalanan seperti pemerasan, pemalakan, pencurian helm, pelecehan seksual, serta penyalahgunaan miras maupun narkoba juga melibatkan anak-anak.² Sementara Ipda Soleh Mas'udi, Kasubag Humas Polres Malang kepada Surya Online menyatakan anak-anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku yang ditangani oleh Unit PPA Polres Malang beragam khususnya. Pada 2011, tercatat ada 166 kasus, yaitu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Kemudian pada 2012, ada 57 kasus. Sedang 2013, mulai Januari – Februari, tercatat ada 17 kasus.³

Kenakalan anak, atau tindak pidana anak menjadi perhatian serius oleh negara dikarenakan negara menyadari bahwa anak pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Karena itulah negara dalam tanggung jawabnya harus memberikan perlindungan kepada anak, ketika anak melakukan suatu tindak pidana

¹**Kejahatan yang Melibatkan Anak Masih Tinggi di Surabaya**, 2013, <http://www.jatim.tribunnews.com>, Yoni, (diakses tanggal 26 Maret 2013)

²**Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa**, 2013, <http://www.kabarbanyuwangi.info>, AKBP Nanang Masbudi, SIK, M.S.i, (diakses tanggal 26 Maret 2013)

³**Anak Terlibat Kejahatan adalah Korban Lingkungan**, 2013, <http://www.surabaya.tribunnews.com>, Satwika Rumeksa, (diakses tanggal 21 Maret 2013)

melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan di Indonesia bahwa pelaku tindak pidana dijatuhi vonis oleh hakim dapat berupa pidana penjara, tak terkecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukuman penjara ialah “*upaya menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup*”.⁴ Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pembinaan narapidana di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tak terkecuali pembinaan narapidana anak. Penempatan Narapidana anak yang harus dipisahkan dari narapidana dewasa, hal ini telah diatur didalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak berhak memperoleh: Pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan

⁴Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (edisi ketiga)**, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hal 181.

kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari pemasyarakatan anak ke lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh narapidana. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu, telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar LAPAS (eksternal). Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik.

II. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dan bagaimana upaya mengatasinya?

III. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan, bukan hasil olahan orang lain,⁵ berupa wawancara dengan Kasi Binadik, Kasi Bimkesmaswat dan Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, dan beberapa anak pidana yang sedang melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan asimilasi bagi anak pidana.

IV. Pembahasan

4.1. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.

1. Syarat-Syarat Asimilasi bagi Anak Pidana

Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar antara lain bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada Anak didik Pemasyarakatan ke arah tujuan pembinaan; memberikan kesempatan pada anak didik pemasyarakatan untuk mempersiapkan diri hidup mandiri dan ikut berperan aktif dalam pembangunan ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pembedaan.⁶

Untuk dapat melaksanakan asimilasi, seorang anak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Syarat Substantif
- b. Syarat Administratif

2. Prosedur Asimilasi bagi Anak Pidana

Tata cara untuk pemberian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia no. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁵ Abdulkadir Muhamad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 170

⁶ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 1 Juni 2013) diolah.

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun tata cara atau prosedur pengajuan asimilasi tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Konsultasi dan Pendaftaran
- 2) Kelengkapan Administrasi
- 3) Litmas oleh BAPAS
- 4) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
- 5) Apabila sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menyetujui usul tersebut, maka Tim Pengawas Pemasyarakatan mengajukan usul tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut wajib segera meneliti dan mempelajari usul tersebut dan apabila ia menyetujui, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut segera menerbitkan Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Asimilasi bagi Anak Pidana.

Bentuk-bentuk kegiatan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar adalah :

- 1) Mengikuti ibadah di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Kegiatan ini berupa sholat jumat di masjid di luar LAPAS seperti di Masjid Nurul Huda Kelurahan Karanglo yang berada tidak jauh dari LAPAS bagi Anak Pidana yang beragama muslim, kebaktian atau misa di Gereja Kristen Jawi Wetan yang berada sekitar 500 meter sebelah utara dari LAPAS bagi Anak Pidana yang beragama nasrani, dll.⁹

- 2) Kegiatan Sosial atau Kerja Bakti di Masyarakat;

Kegiatan ini berupa kerja sosial atau kerja bakti di masyarakat, seperti mengikuti kerja sosial atau kerja bakti di masyarakat kelurahan karanglo yang merupakan tempat dimana LAPAS berada dalam rangka HUT Kemerdekaan RI atau HUT kota Blitar,

⁷ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 1 Juni 2013) diolah.

⁸ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 4 Juni 2013) diolah.

⁹ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 7 Juni 2013) diolah.

Kerja bakti membantu masyarakat membersihkan jalan di depan LAPAS dan disekitar rumah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, dll.¹⁰

3) Kerja di Sekitar LAPAS;

Kegiatan yang lazim dilakukan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yang berasimilasi adalah menjadi juru parkir bagi kendaraan-kendaraan pengunjung LAPAS, menjadi petugas kebersihan di Luar LAPAS dan Tukang kebun tanaman-tanaman di Sekitar LAPAS. Mereka bekerja dari pagi sekitar pukul 08.00 WIB sampai sore sekitar pukul 15.00 WIB.¹¹

4) Kerja di Ladang Sawah dan Kolam Ikan milik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar;

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar memiliki lahan ladang sawah dan kolam ikan yang berada di kelurahan Karanglo kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau sekitar 250 meter utara LAPAS.

Kegiatan yang dilakukan oleh anak pidana yang sedang asimilasi di sawah milik LAPAS adalah bertani, bercocok tanam, mengairi sawah, merawat tanaman pertanian dan memanen saat musim panen tiba. Tentunya mereka di dampingi oleh beberapa tenaga ahli dan petani yang menggarap ladang sawah milik LAPAS. Sedangkan untuk anak pidana asimilasi yang bekerja di kolam ikan adalah memberi pakan pada ikan, membersihkan kolam, mendatangkan bibit ikan, dan memanen ikan saat musim panennya. Anak pidana asimilasi diperkenankan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, dengan pengawasan petugas yang longgar karena pada dasarnya anak pidana yang di tempatkan di tempat ini merupakan anak pidana dengan *minimum security* atau pengawasan minimal. Mereka bekerja dari pagi sampai sore hari, pagi berangkat sekitar pukul 08.00 dan kembali ke LAPAS sorenya.¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 7 Juni 2013) diolah.

¹¹ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 7 Juni 2013) diolah.

¹² Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 7 Juni 2013) diolah.

5) Kerja di Tempat Cucian Mobil dan Motor milik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar;

Bagi anak pidana yang berasimilasi di tempat ini kegiatannya berupa tukang cuci mobil, motor atau kendaraan-kendaraan lain milik LAPAS, selain itu terkadang juga mencuci mobil atau motor milik pegawai-pegawai LAPAS bahkan kendaraan-kendaraan lain milik pengunjung LAPAS.¹³

4.2. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

Dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar ditemukan berbagai kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya program asimilasi, kendala-kendala tersebut adalah:

1) Kesulitan mengurus prosedural asimilasi.

Kesulitan atau Rumitnya Mengurus Asimilasi seperti sulit dan lamanya prosedur mendapatkan izin asimilasi, antara lain: surat pengajuan asimilasi dari pemohon (anak pidana), surat keterangan domisili keluarga dari kelurahan, surat pernyataan kesanggupan mengawasi, dan surat perjanjian pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar.¹⁴

2) Minimnya atau kurangnya dana.

Dana yang dialokasikan untuk asimilasi sangat sedikit sehingga fasilitas dan alat kerja untuk asimilasi yang didapatkan kurang memuaskan dan kurang beragam.¹⁵

3) Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing anak pidana.

Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman (*tutor*) dalam membimbing anak pidana yang berasimilasi sangat berguna agar dapat terjadi *transfer of skill* yang berguna bagi anak pidana nantinya, khususnya untuk anak pidana yang melaksanakan asimilasi kerja (bertani di ladang sawah dan berternak ikan di kolam milik LAPAS).

¹³ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 7 Juni 2013) diolah.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar mengalami kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing anak pidana dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan dana untuk memakai jasa tutor profesional.¹⁶

Selain tutor ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog yang dapat berguna untuk membimbing mental dan karakteristik anak pidana.¹⁷

4) Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat menampung para pemohon asimilasi.

Asimilasi kerja dengan pihak ketiga merupakan bentuk asimilasi yang paling potensial untuk membantu anak pidana yang ingin berasimilasi, akan tetapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar mengalami kendala dalam upaya kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini terjadi karena pihak ketiga merasa takut, curiga dan was-was untuk memakai jasa dan tenaga para anak pidana, ataupun pihak ketiga yang tidak ingin repot dengan membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar perihal jaminan pengawasan kerja atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kerjasama ini.¹⁸

Disamping itu adanya ketentuan yang menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), hal inilah yang mempengaruhi dalam tidak adanya pihak ketiga yang mau bekerjasama menerima dan mempekerjakan anak pidana yang berasimilasi belakangan ini.¹⁹

5) Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap anak pidana.

Pada dasarnya masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pembinaan di LAPAS. Dalam

¹⁶ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

hal pembinaan berupa asimilasi, masih terdapat kendala-kendala seperti pandangan masyarakat yang buruk terhadap anak pidana. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi anak pidana.²⁰

4.3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar

Dalam hal untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dalam upaya pelaksanaan asimilasi anak pidananya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dengan segala cara dan upaya telah mencoba agar dapat menunjang dan mendorong berjalannya asimilasi dengan lancar. Upaya-upaya tersebut adalah :

- 1) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan mengurus prosedural dari asimilasi;

Alternatif yang dapat diberikan untuk meringankan proses pengajuan asimilasi seperti: memberikan contoh surat-surat yang diperlukan untuk pengajuan asimilasi, dengan adanya contoh surat ini diharapkan si pemohon atau pihak keluarga dari anak pidana nantinya dapat lebih mudah dalam menyusun surat-surat yang diperlukan.²¹

- 2) Mengupayakan penambahan anggaran untuk asimilasi

Karena dana yang minim inilah maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar mencari jalan keluar lain, diantaranya seperti: mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM, meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun dari pihak swasta, dan memasarkan hasil pertanian dan perikanan anak pidana yang diharapkan mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak-pihak lain sehingga mau memakai jasa dan tenaga para anak pidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi.²²

²⁰ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

²¹ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 18 Juni 2013) diolah.

²² Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

3) Penyediaan tenaga ahli alternatif

Selain sarana kerja, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar juga mengakali penyediaan tutor kerja dan keterampilan yang profesional dan memerlukan bayaran dengan pelatihan kerja yang diberikan oleh pegawai yang juga menguasai suatu bidang kerja, juga dengan mengandalkan para anak pidana yang mempunyai keterampilan atau kecakapan dalam suatu bidang kerja sesuai dengan profesi yang ditekuninya sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar ataupun para relawan yang dengan sukarela mau melatih para anak pidana untuk peningkatan keterampilan kerja.²³

4) Menjalin kerjasama dengan pihak luar.

Upaya menjalin kerjasama dengan pihak luar terus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, seperti mencari pihak ketiga yang tertarik ataupun bersedia menggunakan jasa dan tenaga kerja dari anak pidana yang berasimilasi, memberikan penyuluhan kepada pihak ketiga bahwa memperkerjakan anak itu tidak dilarang karena ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak atau karena ada ketentuan lain yang menegaskan bahwa anak dapat bekerja, namun tentunya dengan syarat, jenis pekerjaan, waktu kerja dan syarat-syarat lain yang berbeda dengan pekerja dewasa (Pasal 69-71 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).²⁴

Selain itu juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar mendorong agar Kementerian atau Instansi Pemerintah yang terkait (Khususnya di bidang Tenaga Kerja) untuk lebih serius dalam pencarian mitra kerja untuk menampung kegiatan asimilasi anak pidana.²⁵

5) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengadakan dan mengikutsertakan anak pidana dalam berbagai kegiatan sosial, jasmaniah, spiritual dan sebagainya untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap anak pidana.

²³ Hasil wawancara dengan Andik Irawan, Amd.Ip,SH (Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 16 Juni 2013) diolah.

²⁴ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 18 Juni 2013) diolah.

²⁵ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 18 Juni 2013) diolah.

Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Mengikutsertakan anak pidana dalam setiap acara-acara dan perayaan yang dilaksanakan masyarakat sekitar seperti kegiatan sosial, kerja bakti dan kegiatan bersih desa untuk memupuk rasa saling percaya antara anak pidana dan masyarakat diharap dapat menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap anak pidana. menjalin kerjasama dengan pihak terkait (pihak masjid, gereja,dsb) dalam urusan kerohanian anak pidana yang dapat membantu pemupukan moralitas dan spiritual anak pidana.²⁶

V. Penutup

Kesimpulan :

- 1) Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar adalah mengikuti kegiatan ibadah di luar LAPAS, kerja sosial dan kerja bakti di masyarakat, kerja di sekitar LAPAS, kerja di ladang sawah, kolam peternakan ikan dan tempat cucian mobil dan motor milik LAPAS. Tidak ada bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ketiga.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya dana atau sarana dan prasarana untuk asimilasi, dan dari diri anak pidananya itu sendiri, seperti karakteristiknya yang berbeda-beda (labil), ketidakinginan untuk berasimilasi, sikap apatis anak pidana.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dalam mengatasi kendala-kendala asimilasi adalah mencari alternatif dalam pengurusan prosedur asimilasi, alternatif tenaga ahli, alternatif dari pihak-pihak luar, mengajukan penambahan anggaran asimilasi dan mengikutsertakan anak pidana dalam bimbingan rohani atau keagamaan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Yuni Soepardi, S.sos (Kasi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar), (Blitar : 18 Juni 2013) diolah.

Saran :

- 1) Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk dapat meringankan prosedural pengajuan asimilasi, mencari alternatif pelaksanaan asimilasi dan tempat untuk menampung anak pidana yang berasimilasi.
2. Harus ada sinergi yang strategis antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar, anak pidana, masyarakat dan Pemerintah agar dapat menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana.
3. Harusnya ada keluwesan ruang gerak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dalam upaya pemenuhan kebutuhan lembaga sendiri karena hanya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar sendiri yang mengetahui dan mengerti kebutuhan mereka.
4. Menambah anggaran pembinaan terutama untuk asimilasi, mengadakan bentuk-bentuk kegiatan asimilasi yang baru dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan, perusahaan-perusahaan, serta pihak ketiga lainnya untuk turut aktif dalam pembinaan anak pidana khususnya pada tahap asimilasi.

VI. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir, Muhamad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. **Asas-Asas Hukum Pidana (edisi ketiga)**. Bandung : Refika Aditama.

Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia no. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Internet :

- <http://www.jatim.tribunnews.com/> kejahatan yang melibatkan anak masih tinggi di surabaya. 2013.
- <http://www.kabarbanyuwangi.info/> kejahatan anak tanggung jawab siapa. 2013.
- <http://www.surabaya.tribunnews.com/> anak terlibat kejahatan adalah korban lingkungan. 2013.